



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 570/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

KELOMPOK KERJA CGI BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, utamanya bagi penduduk miskin dan kelompok rentan dilakukan upaya pengembangan konsep pelayanan kesehatan yang menjamin kesinambungan pelayanan yang bermutu, reformasi sistem pembiayaan dan mendorong mobilisasi sumber daya.
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pada butir (a.) telah disusun rencana kerja jangka pendek pada tahun 2003, oleh kelompok kerja CGI Bidang Kesehatan.
- c. bahwa untuk mencapai maksud kesehatan sebagai arus utama dalam agenda pembangunan nasional dan meningkatnya proporsi pembiayaan kesehatan yang memadai perlu upaya jangka pendek pada tahun 2003.

Mengingat :

1. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
2. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206.);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010;
19. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1227/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Kelompok Kerja CGI Bidang Kesehatan
- Kedua : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja CGI Bidang Kesehatan sebagaimana ketentuan dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Kelompok Kerja adalah :
- a. Mengumpulkan dan merinci permasalahan kebijakan di bidang kesehatan.
 - b. Mengkaji alternatif kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 - c. Merumuskan alternatif kebijakan.
 - d. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

K e e m p a t : Pembiayaan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran yang tersedia, kerja sama dengan *donor agency*, dan bantuan yang tidak mengikat lainnya.

K e l i m a : Kelompok Kerja harus sudah dapat menyelesaikan upaya yang telah direncanakan dan mendapatkan persetujuan dalam waktu yang telah ditentukan.

K e e n a m : Apabila ditemukan kurang-cermatan di kemudian hari, Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali.

K e e n a m : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 25 April 2003



MENTERI KESEHATAN RI


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 570/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal: 25 April 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA CGI BIDANG KESEHATAN

Tim Pengarah : 1. Prof. DR. dr. Azrul Azwar, MPH
2. dr. Sri Astuti S. Soeparmanto, MSc(PH)
3. Prof. DR. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH
4. Drs. Holid Djahari, Apt, MM
5. dr. Sumaryati Aryoso, SKM
6. dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM

Tim Pelaksana :

Penanggung Jawab Umum : dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
Sekretaris Jenderal Depkes RI

Penanggung Jawab Harian : DR. Dr. Anhari Achadi, MPH.
SAM Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sekretaris I : dr. Gunawan Setiadi, MPH.
Kepala Puskabangkes

Sekretaris II : dr. H. Setiawan Soeparan, MPH.
Kepala Biro Perencanaan & Anggaran

Tim Sekretariat :

1. Drs. Abdurahman, MPH
Kabid Kajian Bangkes Jangka Pendek,
Puskabangkes.
2. dr. Soenarjo Soejoso, MKM.
Kabid Kajian Bangkes Jangka Menengah &
Panjang, Puskabangkes.
3. Dra. Nasirah Bahaudin, MM.
Kabag Kerja Sama Luar Negeri, Biro
Perencanaan & Anggaran
4. drg. Indira Puspasari, MARS.
Kabag TU Puskabangkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelompok Kerja :
Obyektif 1: *Reduce financial vulnerability to major medical expenses and protect the interests of the poor.*

Ketua : dr. Muharso, SKM
SAM Bidang Pembiayaan & Ekonomi Kesehatan

Anggota :

1. dr. Widyastuti Wibisana, MSc(PH)
Direktur Dit. JPKM
2. dr. Yudhi Prayuda ID, MPH
Kabag Perencanaan Strategis dan Program,
Biro Perencanaan
3. dr. Donald Pardede, MPPM.
Kasubdit Pemeliharaan Kesehatan, Dit. JPKM.
4. Atikah Adyas, SKM, MDM.
Kasubdit Pembiayaan JPKM, Dit JPKM
5. Ir. Alwi Alhabsyi, MPH.
Kasubdit Sistem Informasi Manajemen JPKM,
Dit. JPKM.

Obyektif 2: *Optimize the participation of private and NGO providers in the implementation of national health priorities including services for the poor.*

Ketua : dr. Gunawan Setiadi, MPH
Kepala Puskabangkes

Anggota :

1. dr. Chamal Nadjir, MPH.
Kabag Kelembagan, Biro Hukum dan Organisasi
2. Drs. Dyardi Nugroho, MKes
Kabag Keuangan, Setditjen Yanmed
3. dr. Yusharmen, D. Comm.H.
Kabag Program dan Informasi, Setditjen PPM-PL
4. Kodrat Pramudho, SKM, MKes.
Kasubdit Kesehatan Perkotaan, Dit. Kesehatan
Komunitas
5. Atikah Adyas, SKM, MDM.
Kasubdit Pembiayaan JPKM, Dit. JPKM.
6. drg. Theresia R. Andayani, MPH.
Kabag Tatalaksana Keuangan, Biro Keuangan
dan Perlengkapan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Obyektif 3: *Improve governance and ensure an effective institutional environment under decentralization, to support pro-poor health programs.*

- Ketua : dr. Dini Koeswandewi Sriwrespati Latief, MSc.
SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
& Desentralisasi
- Anggota :
1. DR. Faiq Bahfen, SH
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 2. dr. Gunawan Setiadi, MPH
Kepala Puskabangkes
 3. Bambang Hatono, SKM, MSc.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan
 4. A. Choliq Amin, SE, MM.
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
 5. dr. Suwandi Makmur, MM.
Sekretaris II Unit Desentralisasi

Obyektif 4: *Ensure resource allocation and improve funds channeling for priority health programs, especially for the poor.*

- Ketua : A. Choliq Amin, SE, MM.
Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan
- Anggota :
1. drg. Theresia R. Andayani, MPH.
Kabag Tatalaksana Keuangan, Biro Keuangan
dan Perlengkapan.
 2. dr. Yudhi Prayudha ID, MPH.
Kabag Perencanaan dan Pengembangan, Biro
Perencanaan dan Anggaran.
 3. Wiwik Widarti, SKM, MM.
Kabag Keuangan, Ditjen Binkesmas
 4. Drs. Diardi Nugroho, MKes.
Kabag Keuangan, Ditjen Yanmedik
 5. Achmad Djohari, SKM, MM.
Kabag Keuangan, Ditjen PPM-PL

Obyektif 5: *Ensure access to affordable, quality services, especially for the poor.*

- Ketua : dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, MPH.
Kepala Pusgunakes
- Anggota :
1. dr. Mary St. Maryam, MHA.
Kabid Mutu dan Pemerataan Nakes, Pusgunakes.
 2. drg. Rosita Gusfoumi, MM
Kabag Program dan Informasi, Set. Badan
PPSDM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. dr. Tjutjun Maksum, MPH.
Kabid Pengendalian Mutu Kesehatan, Pusdiklat.
4. Dra. Utik Indrawati, MKes
Kabid Pendidikan Umum Nakes, Pusdiknakes.
5. Sudung Nainggolan, MHSc.
Kabid Pemberdayaan Nakes Luar Negeri, Pusat
Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan
Luar Negeri
6. Drs. Amak Rochmad M., MPH.
Kabag Program dan Informasi, Set. Ditjen
Yanmed

Obyektif 6: *Ensure accountability by local government for health systems at all levels by engaging a broad range of stakeholders including the poor.*

Ketua : Drs. Dachroni, MPH.
Kepala Pusat Promokes

Anggota :

1. Ismoyowati, SKM, MKes.
Kabid Kemitraan & Peran Serta, Pusat Promokes.
2. Ir. Dunanty RK Sianipar, MPH.
Kabid Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan,
Pusat Promokes.
3. Kodrat Pramudho, SKM, MKes.
Kasubdit Kesehatan Perkotaan, Dit. Kesehatan
Komunitas
4. Bob Susilo, SKM, MPH.
Kabag TU, Pusat Promokes
5. dr. Mardiono, MPH.
Kasubdit Institusi Kesehatan dan UKBM, Dit
Kesehatan Komuitas.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 25 April 2003

MENTERI KESEHATAN RI




Dr. Achmad Sujudi